

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan membahas Pemikiran Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amirullah atau di kenal dengan sebutan Buya Hamka sebagai fokus penelitian terkait masalah etika politik. Kajian etika politik secara umum tentunya tidak hanya mengkaji persoalan perilaku politikus saja. Akan tetapi, etika politik juga membicarakan persoalan *polity*, *policy* dan *politics*.¹ Dan hal inilah yang akan dikaji secara komprehensif serta mendalam lewat perspektif Buya Hamka sebagai seorang filsuf. Meskipun Beliau tidak membuat khusus buku yang bertemakan etika politik, tapi pemikirannya tentang hal semacam itu dapat kita temukan dalam karyanya seperti; lembaga hidup, tasawuf modern, falsafah hidup, lembaga budi, tafsir Al-Azhar dan lain sebagainya. Penulis menilai lima karya Buya Hamka yakni; falsafaf hidup, lembaga budi, lembaga hidup, tafsir Al-Azhar, tasawuf modern, dapat kita ambil pelajaran tentang kebijaksanaan hidup atau lebih tepatnya pengajaran moral untuk menangani berbagai persoalan hidup yang dihadapi di era sekarang ini khususnya dalam bidang politik. Dan hal ini menurut penulis sangat tepat untuk dikaji dan dibahas demi kemajuan keilmuan khususnya di bidang Politik Islam.

Kondisi politik Indonesia saat ini tentu sudah jauh berkembang dibandingkan pada masa lampau. Akan tetapi sejumlah krisis moral dalam dinamika politik Indonesia juga tidak dapat dielakkan. Cita-cita mulia founding father untuk menciptakan bangsa yang bermartabat masih jauh dari harapan. Bagaimana tidak, sejumlah kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) mulai terkuak laiknya fenomena

¹ Haryatmoko, "*Etika Politik dan Kekuasaan*", (Jakarta Selatan: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm.27-28.

gunung es yang tidak kunjung selesai. Perebutan kursi pejabat politik menjadi tradisi lima tahunan yang selalu terjadi, dan berbagai masalah politik lainnya yang semakin berkembang ke arah lebih kompleks.

Berkaca kembali pada akhir masa Orde Lama yang di pimpin oleh Presiden Soekarno yang akhirnya ambruk karena instabilitas sosial ekonomi dan politik. Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto yang di kenal dengan masa Orde Baru, yang dirancang dengan kebijakan jangka panjang 25 tahun atau dinamai istilah rencana pembangunan lima tahun disingkat (RAPELITA). Memang, di awal pemerintahan Orde Baru memberikan angin segar bagi kondisi pembangunan infrastruktur, sosial, politik dan perekonomian negara. Pembangunan jangka panjang I sampai IV terus dilakukan dalam segala bidang kehidupan. Akan tetapi, kemajuan positif tersebut mulai menunjukkan penurunan level yang sangat kentara pada akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) IV. Penurunan ini berdampak sangat signifikan yang berimplikasi pada perilaku elite politik berbangsa dan bernegara, baik dalam aspek suprastruktur maupun infrastruktur.²

Pasca runtuhnya Orde Baru kemudian muncul reformasi pada kenyataannya ternyata tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan era sebelumnya. Kebebasan yang dikekang pada masa Orde Baru ternyata berubah menjadi kebebasan tanpa batas sehingga mengarah kepada anarkhisme, saling curiga antar elite politik. Kemudian muncul berbagai pemberontakan seperti Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, dan lain sebagainya. Bahkan di saat pemerintah sibuk menyelesaikan kasus-kasus terorisme yang marak terjadi, di lain pihak banyak juga pejabat yang ditangkap tangan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena kedapatan melakukan praktik KKN. Belum lagi selesai permasalahan tersebut, masyarakat disuguhi dengan

² Natsir, N.F., "*Moral dan Etika Elit Politik*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.1-3.

drama persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan layaknya sandiwara politis belaka. Serta berbagai masalah politik lainnya di negeri ini yang datang silih berganti.

Suguhan-suguhan problem politik tersebut kemudian menimbulkan persepsi negatif bahwa politik itu dipandang keculasan, memperkaya diri dan membangun kekuasaan. Sering orang menilai bahwa rambu- rambu moral dalam berpolitik hanyalah bagian dari retorika politik. Stigma semacam inilah, selanjutnya menjadikan sebagian orang menilai sinis terhadap pentingnya “Etika Politik”. Kondisi ini tentu sangat berbahaya karena menunjukkan suatu sikap keputusasaan.

Etika politik terdiri dari banyak sekali ragam dan varian, salah satunya adalah etika politik Islam. Etika politik Islam pada perkembangan selanjutnya berusaha memberikan aspek dan kriteria-kriteria normatif dalam dunia perpolitikan. Tujuannya adalah menawarkan konsep-konsep politik santun. Sehingga berbagai macam tindakan politik yang menyimpang dari kaidah politik santun dapat diminimalisir. Konsekuensinya rakyat menjadi sejahtera, kehidupan politik berbangsa dan bernegara menjadi stabil dan lain sebagainya. Kajian etika politik secara umum tentunya tidak hanya mengkaji persoalan perilaku politikus saja. Akan tetapi, etika politik juga membicarakan persoalan *polity, policy dan politics*.³

Etika merupakan sebuah pemikiran sistematis tentang moralitas. bila dilihat ke belakang etika sebagai usaha filsafat yang lahir dari kehancuran tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu.⁴ Kata asal etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ethos” yang artinya watak atau adat. Hal ini identik dengan kata asal moral dari bahasa Latin “mos” (jamaknya adalah mores) yang artinya adat atau cara hidup. kata tersebut menampakkan bagaimana berbuat cara yang menjadi adat dengan

³ Haryatmoko, *op.cit.*

⁴ Magnis Suseno, *Etika Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 15.

persetujuan atau aktivitas segerombolan manusia.⁵ Etika juga merupakan usaha individu untuk menggunakan akal pikirannya untuk menemukan segala sesuatu hal yang baik untuk dirinya. Sebagaimana kaum agama, mereka juga membutuhkan hal semacam itu.⁶

Etika berfokus pada mengevaluasi dan menggambarkan tanggapan yang dimiliki orang ataupun sekelompok orang untuk penilaian baik atau buruk benar atau salah untuk dirinya, terkhusus bila istilah itu terkoneksi pada kepercayaan manusia, sikap, dan tindakan. ‘Abduh berpendapat bahwa, intuisi moral dapat memutuskan prinsip pertama moralitas dan keterlibatan moralitas bagi lingkungan sosial dan politik.

Aristoteles berargument bahwa etika dan politik itu mempunyai hubungan yang paralel. Hal ini tercermin pada tujuan yang mempunyai kesamaan yakni ingin mencapai terciptanya warga negara yang baik, setia kepada negara, susila dan lain sebagainya. Semua hal itu merupakan kewajiban moral dari setiap warga negara, sebagai modal pokok untuk membentuk suatu kehidupan bernegara, berpolitik yang baik, dalam arti makmur, tenteram, dan sejahtera.⁷

Suatu sistem normatif tidak dapat ditawarkan oleh etika politik dalam dasar negara karena etika politik tidak pada sistem legitimasi politik tertentu dan tidak bisa menyamai ideologi negara. namun etika politik bisa mendongkrak usaha masyarakat untuk menjelmakan ideologi negara kedalam fakta politik yang sebenarnya, contohnya

⁵ Muhammad Said, *Etika Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), h. 23.

⁶ Franz Magnis Suseno, *op.cit.* hlm.17.

⁷ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial (Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 111.

dengan mencerminkan apa arti keadilan sosial, mendasari etis kerakyatan, dan seperti apa kekuasaan itu harus dilakoni.⁸

permasalahan etika politik merupakan hal yang sangat menarik dan penting untuk dibahas dalam agama Islam. Ada banyak alasan yang melatar belakangi hal tersebut. pertama, dalam Islam setiap aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah termasuk juga politik dalam hal ini, maka prinsip-prinsip yang kita pakai dalam berpolitik harus sesuai ketentuan dalam Islam. contohnya, segala sesuatu harus diniatkan karena Allah bukan karena ingin mengejar kekuasaan ataupun kekayaan.

Kedua, etika politik sangat erat berkenaan dengan prinsip Islam dalam tatakelola masyarakat. Hal ini berhubungan dengan sosialisasi antar manusia, misalnya saling menghargai satu sama lain, saling menghormati antara tua muda maupun sebaliknya, tidak egois dalam mengemukakan pendapat, dan sebagainya. Kurang lebih begitulah seharusnya etika yang ada dalam dunia politik dan hal ini semuanya sudah diatur dalam Islam.⁹

Etika politik islam sangat erat hubungannya dalam implementasi tata kelola negara. Karena didalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dengan negara. Islam tidak hanya agama dalam artian barat yang sekuler, namun Islam merupakan satu paket hidup yang lengkap mengatur segala lini kehidupan termasuk juga politik.

Dari sekian banyak tokoh-tokoh politik Islam khususnya di Indonesia peneliti tertarik untuk mengkaji konsep etika politik menurut pemikiran Buya Hamka. Di masa-masa penjajahan hingga perjuangan kemerdekaan, pembicaraan masalah agama, politik, sastra dan lain sebagainya tidak lepas dari pengaruh Buya Hamka baik

⁸ Franz Magnis Suseno, *op.cit.* hlm.7

⁹ Hakim, Ahmad dan M. Thalbah, "*Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka*", (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.7

pemikiran maupun sepak terjangnya. Dalam berbagai karangan dan juga ceramah serta orasi yang disampaikan Buya Hamka banyak berbicara terkait bidang-bidang tersebut. Dalam dunia sastra Hamka menulis novelnya yang berjudul *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* (1937), *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1936), dan lain sebagainya. Demikian juga dalam bidang agama dan politik, pemikiran Buya Hamka banyak tertuang dalam tafsirnya yang fenomenal seperti *Tafsir Al-Azhar* kemudian *Keadilan Sosial dalam Islam*, *Falsafah Ideologi Islam*, dan lain sebagainya. Karir politik Buya Hamka juga nampak dalam sepak terjangnya di kala aktif sebagai anggota Partai Masyumi dan kemudian sebagai ketua MUI pada 1975 hingga 1981.¹⁰

Berbagai permasalahan politik yang telah disebutkan di atas tentu memiliki akar masalah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan tersebut. Mulai dari sistem politik, sarana politik maupun tujuan politik yang perlu diluruskan kembali sesuai dengan relnya. Misalnya saja praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme yang menjadikan kemiskinan, kecemburuan dan kesenjangan sosial terjadi di negara ini. Semua orang tentu sepakat bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme sangat merugikan rakyat dan hanya menguntungkan segelintir oknum atau golongan saja. Buya Hamka kemudian mengatakan bahwa walaupun suatu pekerjaan mendatangkan keuntungan namun Tuhan melarang, maka mau tidak mau harus ditinggalkan.¹¹ Demikian halnya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang nyata-nyata merupakan perampokan atas uang rakyat. Harga seseorang adalah pribadinya. Seseorang dinilai baik dan buruk dilihat dari konsistensi pribadinya.¹² Seorang Muslim yang konsisten dengan keimanannya akan selalu teguh dalam melawan kemunkaran termasuk berbagai bentuk

¹⁰ Damami, Mohammad, *"Tasawwuf Positif dalam Pemikiran Hamka"*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), hlm.78

¹¹ Hakim, Ahmad dan M. Thalhah, *"Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka"*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.70

¹² Hamka, *"Pribadi Hebat"*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1966), hlm.12

tindakan KKN. Persoalan diatas bukan hanya pertanggung jawaban seorang muslim, namun seluruh komponen Bangsa Indonesia secara umum.

Problem politik lain yang perlu diperhatikan menurut Buya Hamka bahwa keterpurukan bangsa ini nampak ketika banyak orang yang bukan ahlinya memegang tampuk kekuasaan. Dalam pandangan Buya Hamka ada dua hal wajib yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin, pertama ilmu dan kedua adalah tubuh yang sehat. Hamka tidak mempersoalkan gender bagi kepala negara, karena yang terpenting adalah ilmu dan fisik yang memadai.¹³

Sedikit pemikiran etika politik menurut Buya Hamka di atas menarik minat peneliti untuk mengkaji lebih jauh pemikiran Buya Hamka khusus terkait etika politik yang mengandung nilai-nilai dari ajaran Islam karena notabene Buya Hamka adalah seorang Ulama besar dan mulia bagi umat Islam. Selama ini sejauh penelusuran peneliti masih sedikit kajian-kajian tentang etika politik Buya Hamka secara sistematis. Kebanyakan adalah kajian-kajian ilmu Agama. Untuk itulah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap Pemikiran Buya Hamka tentang Etika Politik dan relevansinya terhadap perpolitikan di Indonesia sekarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pemikiran Buya Hamka tentang etika Politik?
2. Relevansi pemikiran etika politik Buya Hamka terhadap politik Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:

¹³ Hakim, Ahmad dan M. Thalhah, *op.cit*, hlm.79

- a. Menjelaskan konsep Pemikiran Buya Hamka Tentang etika Politik
- b. Menjelaskan relevansi pemikiran etika politik Buya Hamka terhadap politik di Indonesia

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoretis

Diharapkan dapat menyumbangkan sedikit pengetahuan demi mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang politik dan selanjutnya dapat membantu bagi penelitian-penelitian dibidang politik lainnya.

b. Manfaat Praktis

Untuk Penulis pribadi, dapat memperbanyak pengetahuan tentang etika berpolitik dalam Islam, khususnya dalam pemikiran Buya Hamka. Adapun bagi Almamater, diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian ilmu politik islam yang bertemakan politik Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang mengkaji tentang pemikiran Buya Hamka sudah cukup banyak dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian yang terkait mengkaji pemikiran-pemikiran Buya Hamka:

1. Ahmad Hakim dan M. Thalhah, 2005, Buku: “Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka”, UII Press Yogyakarta. Buku ini menjelaskan bahwa pemerintahan Islam atau politik Islam dalam perspektif Hamka adalah sistem kekuasaan yang menjamin kemaslahatan hakiki umat manusia dunia dan akhirat. Di dalam buku ini juga menjelaskan konsep Hamka tentang syura, negara dan kepala negara, agama dan negara serta hubungan internasional. Bertolak dari judul buku ini, kajian moral politik Hamka sangat sedikit dan

dangkal. Analisis dalam buku ini terlalu banyak komparasi dengan pemikiran tokoh politik Islam lainnya sehingga ide-ide politik bermoral agama Hamka tidak nampak menonjol.

2. Muji, 2005, Skripsi: Politik Menurut Hamka (Kajian terhadap Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Politik dalam Tafsir Al-Azhar), Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam pandangan Hamka, kedaulatan adalah mutlak milik Tuhan. Sedangkan manusia dianugerahi kedaulatan nisbi atau insani sebagai khalifatullah dengan menjalankan syariat dan ketentuan Allah. Penelitian ini lebih mengarah kepada kajian ilmu politik Islam di dalam Tafsir Al-Azhar.
3. Achmad Syahrul, 2009, Skripsi: Penafsiran Hamka tentang Syura dalam Tafsir Al-Azhar, Jurusan Tafsir dan Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi ini menjelaskan bahwa syura merupakan dasar pemerintahan suatu negara Islam sekalipun Hamka tidak secara tegas menyebut negara Islam. Syura harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kaum Muslim berada. Hendaknya di dalam syura mempertimbangkan maslahat mafsadat. Berdasarkan ulasan-ulasan yang terdapat di dalam skripsi ini dapat dikategorikan bahwa kajian ini termasuk ke dalam kategori penelitian ilmu politik pemerintahan Islam khususnya yang terkait Syura.
4. Zainuddin Arifin, 2009, Tesis: Konsep Etika Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah): Kontribusi bagi Pendidikan Islam di Indonesia, Program Studi Ilmu Filsafat, Pascasarjana Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada. Tesis ini menjelaskan bahwa substansi etika yang diusung oleh Hamka yaitu:

etika religius, etika individual, etika sosial dan etika kebahagiaan yang bernuansa Islami. Hamka berjasa besar dalam merekonstruksi pendidikan tradisional Indonesia menjadi sistem pendidikan modern.

5. Elfi, 2003, Tesis: Konsep Manusia Ideal dalam Pemikiran Hamka, Program Pascasarjana Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada. Sistem pemikiran Hamka cenderung bercorak sufistik. Konsep manusia Ideal menurut Hamka sejalan dengan manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila dan menekankan keseimbangan jiwa-raga, individu-sosial, dan pribadi-makhluk Tuhan.

Berdasarkan sejumlah penelitian karya tulis tentang Buya Hamka dan pemikirannya di atas, penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini memiliki objek kajian yang jelas. Objek material dalam penelitian ini adalah konsep-konsep etika politik yang bernuansa Islami dalam pemikiran Buya Hamka. Objek formal penelitian ini adalah etika politik. Tentu penelitian ini lebih spesifik dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas ilmu politik pada umumnya. Kekhususan penelitian ini terletak dalam upaya untuk menjelaskan konsep etika politik berdasarkan karya-karya asli tulisan Buya Hamka dan karangan lain tentang Buya Hamka.

E. Kerangka Teori

Objek material dalam penelitian ini adalah pemikiran Buya Hamka sedangkan objek formalnya adalah Etika Politik. pada persoalan konsep politik Buya Hamka bahwa dalam penelitian ini ada 3 aspek yang akan dikaji sejauh bahasan etika politik seputar *policy*, *polity*, dan *politics*. Kajian etika politik secara umum tidak lepas dari masalah apa itu etika dan apa itu politik. Istilah etika mengacu kepada kajian tentang

kesusilaan (moral). Kesusilaan adalah keseluruhan aturan, kaidah atau hukum yang mengambil bentuk amr (perintah) dan larangan. Kesusilaan memiliki misi untuk mengatur manusia agar tidak berbuat semaunya.¹⁴

Politik secara sederhana diartikan sebagai segala usaha masyarakat untuk mengatur negara. Politik menyangkut sistem partai, sistem pembagian daerah, sistem pembagian kekuasaan dan lain sebagainya. Asal-mula istilah politik berasal dari kata *polis* yang artinya “Negara Kota”. Maksudnya, segala aktivitas *polis* untuk kelestarian dan keberlanjutan makna *polis* disebut “*politike techne*” (politika). Hakikat *polis* dapat diartikan sebagai seni pemerintahan.¹⁵

Kajian etika politik secara umum bermula dari filsafat politik, karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Alan Brown menyebutkan bahwa persoalan filsafat politik berangkat dari pertanyaan “Apa cara terbaik atau yang benar bagi manusia untuk hidup bersama?” filsafat politik terkait juga dengan persoalan “Bagaimana seharusnya masyarakat diorganisir?” Berangkat dari pertanyaan tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya etika politik merupakan landasan atau titik tolak kajian filsafat politik. Frans Magniz Suseno kemudian mengartikan bahwa etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia.¹⁶

Kedudukan filsafat dalam kajian etika politik Islam bukan diartikan sebagai suatu kebijaksanaan hidup, sikap hati, sistem nilai, pandangan dunia yang bersifat *imajiner* tetapi dalam arti ilmiah yang berciri akademis dan bersumber dari realitas.¹⁷ Etika politik Islam memberikan acuan dan norma penilaian mutu politik dan penyelenggaraan negara dengan tolok ukur martabat manusia. Kemudian etika politik

¹⁴ Sofyan, Ayi, *op. cit*, hlm. 38

¹⁵ Efriza, “*Ilmu Politik (dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan)*”, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 12

¹⁶ Suseno, F. M., “*Etika Politik*”, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 8

¹⁷ Sofyan, Ayi, *op. cit*, hlm. 62

Islam juga membantu dalam mengimplementasikan sistem moral atau ideologi yang dianut oleh suatu negara ke dalam realitas politik. Implementasi etika politik Islam bagi umat Islam sendiri merupakan keharusan yang wajib dilaksanakan dalam semua sendi kehidupan perpolitikan. Kajian etika politik Islam tidak semata-mata untuk kepentingan pengembangan ilmu atau kritik ideologi saja, tetapi aturan hidup yang harus dilaksanakan.¹⁸

Paul Ricoeur menyebutkan bahwa pada perkembangan selanjutnya tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.¹⁹ Setelah memaparkan sedikit istilah etika politik Islam, kemudian muncul pertanyaan perbedaan kajian etika politik Islam dan ilmu politik.

Menurut J. Barents ilmu politik adalah “ilmu yang mempelajari kehidupan Negara, yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat: ilmu politik mempelajari bagaimana negara melakukan tugasnya”. Lebih lengkap, Wilbur White menjelaskan bahwa ilmu politik adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk, susunan, dan proses dari suatu negara dan pemerintahan.²⁰ Sedangkan Hoogerwerf mengartikan ilmu politik sebagai ilmu tentang kebijakan pemerintah. Kebijakan di sini maksudnya adalah usaha membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan.²¹ Harold Lasswell seorang pakar politik modern mendefinisikan ilmu politik sebagai disiplin empiris (yakni) pengkajian tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan serta tindakan politik seperti yang ditampilkan seseorang dalam perspektif-perspektif kekuasaan.²²

¹⁸ *Ibid*, hlm.50-51

¹⁹ Haryatmoko, *op.cit* , hlm.25-26

²⁰ Efriza, *op. cit*, hlm.7

²¹ *Ibid*, hlm.10

²² Dhal, Robert, “*Analisis Politik Modern*”, (Jakarta: Bumi Aksara,1994), hlm.3

Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya “Ilmu Politik Islam” membagi kajian ilmu politik kedalam dua golongan besar. Pertama, ilmu politik yang bersifat praktis. Artinya, ilmu politik merupakan ilmu tentang kepandaian dan kebijaksanaan dalam memerintah. Kedua, ilmu politik teoretis, menyelidiki segala macam teori mengenai soal-soal kenegaraan dengan semua bagiannya. Kedua definisi tersebut memang terkesan sama dalam hal objeknya, namun perbedaannya terletak di dalam cara pembahasannya. Kalau ilmu politik praktis mendasarkan kepada kenyataan dalam pemerintahan harus dijalankan dengan kepandaian, sedangkan ilmu politik teoretis adalah kajian ilmu politik praktis secara ilmiah.²³

Masih banyak tokoh lain yang mendefinisikan ilmu politik dari sudut pandang dan pertimbangan masing-masing. Akan tetapi dari beberapa pengertian ilmu politik tersebut di atas sudah cukup untuk diketahui bahwa sekalipun etika politik Islam dan ilmu politik memiliki objek material yang sama, namun sudut pandang dan tujuannya berbeda. Etika politik Islam mengarahkan kajiannya dalam lingkup pemikiran dan tindakan politik dalam perpektif filsafat moral. Sedangkan, ilmu politik lebih kepada konsep-konsep teoretis terkait tindakan dan kebijakan politik.

Keterangan di atas akan sangat membantu dalam mengkaji etika politik dalam pemikiran Buya Hamka yang mengandung nilai-nilai dan ajaran Islam sesuai sumber aslinya. Semua aspek yang termasuk dalam kajian etika politik dalam pemikiran Hamka akan dijabarkan sedetail mungkin sehingga dapat dijabarkan dengan baik. Pada akhirnya penelitian ini dapat digolongkan ke dalam kajian etika politik dalam pemikiran Buya Hamka yang mengandung nilai-nilai dan ajaran Islam.

F. Metode Penelitian

²³ Ahmad, Z. A., *op. cit* , hlm.107-108

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ialah penelitian dengan cara memanfaatkan sumber kepustakaan seperti buku, journal, dan karya tulis lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian.²⁴

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah atau *historical research* karena objek penelitian ini bersifat kajian sejarah dan pemikiran tokoh. *historical research* adalah sebuah pendekatan kajian masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.²⁵

3. Sumber Data

Bahan atau sumber materi penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang terdiri dari buku, jurnal, penelitian yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Bahan penelitian tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan sehingga kajian ini terarah secara sistematis dan komprehensif. Bahan penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yakni bahan data primer dan bahan data sekunder.

a. Bahan data primer

Bahan data primer merupakan bahan atau materi penelitian yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Berikut beberapa bahan data primer yakni:

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2009), hlm.1

²⁵ Bungaran Antonius, dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor, 2014), hlm.8

- 1) Hamka, 2015, *Falsafah Hidup*, Republika, Jakarta.
- 2) Hamka, 2015, *Lembaga Hidup*, Republika, Jakarta.
- 3) Hamka, 2015, *Lembaga Budi*, Republika, Jakarta.
- 4) Hamka, 2015, *Tasawuf Modern*, Republika, Jakarta.
- 5) Hamka, 1951, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Widjaya, Djakarta.
- 6) *Tafsir Al-Azhar*.

b. Bahan data sekunder

Kajian ini juga memanfaatkan sumber data sekunder lainnya sebagai tambahan dan pendukung penelitian ini. Bahan data sekunder terdiri dari buku, artikel-artikel, jurnal penelitian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tema dan kajian penelitian ini.

4. Pengumpulan data

Pada tahap ini yakni mencari sumber yang relevan sehingga kajian dapat terarah secara sistematis dan komprehensif. Baik itu berupa buku karangan tokoh yang akan diteliti, maupun buku karangan orang yang membahas tentang beliau, dan tentunya literatur-literatur yang menjelaskan terkait pemikiran, politik, dan sejarah. Dalam hal ini penulis sendiri menggunakan beberapa buku sebagai sumber primer, diantaranya yaitu buku karya dari Buya Hamka sendiri yang berjudul *Islam Revolusi dan Ideologi*, *Falsafah Ideologi Islam*, dan juga buku karya penulis Ahmad Hakim dan M. Thalhah berjudul *Politik Bemoral Agama Tafsir Politik Hamka* yang berisikan tentang penafsiran sang penulis terhadap pola pemikiran Buya Hamka terhadap Politik. Penelusuran Sumber ini penulis lakukan dengan mencari ke beberapa perpustakaan. Diantaranya perpustakaan

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, dan perpustakaan UNSRI serta beberapa sumber merupakan koleksi pribadi milik penulis.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis dan mengolah data kepustakaan yang telah didapatkan, peneliti menggunakan beberapa metode analisis data sebagaimana berikut:

- a. Deskripsi yakni menyajikan sejarah hidup Hamka dan pemikiran politik Hamka secara sistematis;
- b. Interpretasi yakni proses menafsirkan konsep-konsep dan pemikiran Hamka yang terkait etika politik secara mendalam;
- c. Komparatif yaitu mempertemukan antara pemikiran etika politik dalam pemikiran Buya Hamka dengan pendapat-pendapat tokoh politik Islam;
- d. Kesenambungan historis, pertama, menarik hubungan historis latar belakang Hamka dengan konsep etika politiknya. Kedua, menjelaskan bahwa konsep etika politik dalam pemikiran Buya Hamka sangat relevan jika dikaitkan dan diaplikasikan dalam praktik politik Indonesia saat ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang berjudul, “Pemikiran Buya Hamka Tentang Etika Politik” ini terdiri dari empat bab sebagaimana berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang mencakup butir-butir sub-bab proposal skripsi. Bab ini meliputi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

.Bab II memaparkan biodata dan profil kehidupan Hamka. Bab ini meliputi riwayat

hidup, karya dan tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Hamka.

Bab III berisikan tentang studi etika politik. Meliputi definisi etika politik, etika politik Islam, sejarah etika politik, dan etika politik menurut para ahli.

Bab IV berisi pembahasan tentang konsep pemikiran Buya Hamka tentang etika politik. Bab ini akan membahas tema-tema pokok etika politik Hamka yang terkait politics, policy, polity dalam pemikiran Hamka. Dalam bab ini juga dilengkapi dengan pembahasan mengenai relevansi pemikiran etika politik Buya Hamka terhadap kondisi politik di Indonesia.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran